

**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Umar  
selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung  
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung  
(Jumat, 30 Mei 2014)**

## HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI  
ELEKTRONIK (KPE)

### **Fokus pada Implementor (BKD)**

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Pada dasarnya KPE untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan Kebijakan dari Pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara. Fungsi utamanya adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil pengganti Kartu Pegawai yang dipandang sudah ketinggalan jaman. Selain itu KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : BKD sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam Implementasi KPE selalu berupaya untuk memenuhi segala prosedur administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, selain itu BKD selalu berkoordinasi dengan BKN terkait Juklak dan Juklis yang harus diikuti dalam implementasi KPE dalam hal ini merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Dalam Surat Edaran yang kami sebarakan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh PNS dalam proses perekaman data pegawai antara lain seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Pada dasarnya kami tidak menemui kendala yang berarti dalam proses Implementasi KPE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan pihak Badan Kepegawian Negara, BKN menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT. Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Saat ini, ditahun 2014 masih ada  $\pm 1500$  PNS yang belum memiliki KPE, dan hal ini yang sedang kami perjuangkan agar di tahun ini juga Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki jadwal yang pasti untuk pemphotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Banyak cara yang sudah dilakukan BKD dalam sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, antara lain melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu dengan membuka Loker Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya, tentu saja sangat berperan dalam memberikan arahan- arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, BKN adalah tempat kami mencari solusi terkait kendala-kendala yang kami hadapi. Selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauh mana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Iya tentu saja, berbagai kendala yang kami hadapi saat proses implementasi selalu kami konsultasikan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara, misalnya saja terkait penunjukan layanan perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Perekaman data KPE pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Ada 3 Bank yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada KPE. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji bertempat di Gedung Sumergow Pemerintah Kota Bandar Lampung.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Sejauh ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Lampung terkait Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji. Pihak Provinsi Lampung melalui Surat Gubernur Nomor 800/3201/II.12/2009 merekomendasikan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk otentikasi pembayaran gaji, tetapi kami masih melihat bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan otentikasi layanan perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah

layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji PNS bukan justru menimbulkan masalah baru.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (KARPEG) tentu saja sudah sesuai, kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ke-3 dalam Otentikasi Layanan Perbankan.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya, sebagai Konversi dari Karpeg.

### **Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)**

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya sudah mendukung, baik dalam Sumber Daya Manusia (PNS) dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Menurut saya sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD sudah memahami Tuposi-nya. Selain itu dalam proses perekaman data pegawai dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu PT. Sucofindo.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Dalam proses implementasi KPE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang berinduk pada APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, Sosialisasi kami lakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow dan dengan membuka Locket Pelayanan Informasi KPE pada BKD Kota Bandar Lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Mengadakan Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan mensosialisasikan apa itu KPE, Fungsi dari KPE. Selanjutnya bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Locket Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran, Locket Pelayanan Informasi KPE.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Kendala teknis yang kami hadapi adalah alat atau perlengkapan yang disediakan oleh PT. Sucofindo untuk merekam data pegawai sering terjadi error atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam proses perekaman data PNS.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Secara teknis BKD Kota Bandar Lampung mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD melalui Surat Edaran Walikota terkait jadwal perekaman data PNS. Selanjutnya BKD menyiapkan lokasi untuk perekaman data PNS oleh pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian tentang KPE sudah kami sediakan pada Badan Kepegawaian Daerah, sehingga PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bisa memanfaatkannya.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Staf BKD siap memberikan penjelasan informasi tentang KPE pada Loker Pelayanan Informasi KPE pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Pada jam-jam kerja banyak PNS yang memanfaatkan Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian dengan menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Pada dasarnya KPE merupakan kebijakan dari pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Bandar Lampung harus mendukung dan menyukseskan agenda kebijakan nasional yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara salah satunya kebijakan tentang KPE. Tentu saja Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan terus mengupayakan agar KPE tidak hanya berfungsi sebagai Konversi dari Kartu Pegawai yang berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, tetapi juga bisa digunakan dalam meningkatkan layanan kepegawaian melalui Layanan Perbankan atau pembayaran gaji PNS. Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan mendukung pihak perbankan dalam hal ini Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk bisa melaksanakan Layanan Perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji PNS dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama. Persoalannya hari ini adalah, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mempertimbangkan dengan seksama bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan Layanan Perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah

ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji bukan justru menimbulkan masalah baru.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Yang pertama harus dilakukan adalah membangun komunikasi kembali dengan Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Lampung dalam hal implementasi layanan perbankan otentikasi pembayaran Gaji PNS Kota Bandar Lampung, kita akan melihat sejauh mana kesiapan BPD dalam hal teknis pembayaran gaji PNS, Jumlah ATM misalnya. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait memfungsikan KPE dalam layanan perbankan. Koordinasi juga harus dilakukan dengan Bagian Keuangan terkait teknis pelaksanaannya dan yang terakhir adalah kembali melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya selama ini upaya yang kami lakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Hampir seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan ini dengan melakukan proses perekaman data Pegawai.